SKRIPSI

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN SAP PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM

(Studi Kasus pada RSUD Type B Kota Parepare)

AGUNG NUGRAHA
1410321096

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
2018

SKRIPSI

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN SAP PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM

(Studi Kasus pada RSUD Type B Kota Parepare)

AGUNG NUGRAHA
1410321096

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
2018

SKRIPSI

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN SAP PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM

(Studi Kasus pada RSUD Type B Kota Parepare)

Disusun dan diajukan oleh

AGUNG NUGRAHA
1410321096

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 14 Agustus 2018

Pembimbing

Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak, CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar

Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN SAP PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM

(Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Type B Kota Parepare)

Disusun dan diajukan oleh

AGUNG NUGRAHA
1410321096

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 14 Agustus 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1.....
2	Dinar, S.E., M.Si	Sekertaris	2.....
3	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Anggota	3.....
4	Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM	Eksternal	4.....

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar

Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Agung Nugraha

NIM : 1410321096

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual Berdasarkan SAP Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Type B Kota Parepare)** adalah karya ilmiah saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

Agung Nugraha

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyususnan skripsi dengan judul "**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual Berdasarkan SAP pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada RSUD Type B Kota Parepare)"** dapat terselesaikan.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah, ibu, kakak yang selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian, dan cinta kasih yang tak terhingga, serta doa yang tiada pernah berhenti tercurah kepada penulis agar menjadi pribadi yang sukses, dan menjadi kebanggaan keluarga.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan saran dan nasihat serta kesabaran dan ketelitian membimbing penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar.

4. Ibu Yasmi Nurdin, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar atas segala ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
6. Ibu Dr. Hj. Renny Anggraeni Sari, MARS, DPDK selaku Direktur bidang Administrasi dan Keuangan RSUD Type B Kota Parepare yang telah memberikan izin dan telah berkenan memberikan kemudahan dalam memberikan data yang diperlukan guna penelitian yang dilakukan oleh penulis.
7. Seluruh Staf bidang Administrasi dan Keuangan RSUD Type B Kota Parepare yang telah berkenan memberikan kemudahan dalam memberikan data yang diperlukan guna penelitian yang dilakukan oleh penulis.
8. Teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2014 yang selalu mendukung dan mendoakan, terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Terima kasih kepada seluruh sahabat terbaik (I Gusti Nyoman Astawa S.E, Zul Qaffi S.E, Renaldi S.E, Refaldi S.E, Candra, Yasser Zulfikar, Agung Setiawan Ojong, Jacky Kurnianto, Irwan Wijaya S.E , Supardi Haris S.E, Muh. Dahril Alqadri serta JDR all Squad) yang selalu memberikan motivasi, doa dan simpatinya serta yang selalu menemani setiap hari baik malam maupun siang.
10. Terima Kasih Kepada PPGT Jemaat Tamalanrea Kelompok 8/9 yang selalu memberikan motivasi, doa, dan simpatinya
11. Terima kasih juga buat rekan-rekan PPGT Jemaat Tamalanrea yang namanya tidak disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan doa

12. Terima kasih buat Kak Narty PPGT Jemaat tamalanrea yang selalu memberikan motivasi setiap hari dan doanya
13. Terima kasih juga buat teman-teman KOBU (Komodo dan Buaya) Evan, Kak mengan, Zeth Subito, Anugrah, Ryan, Gayang atas doa dan motivasinya
14. Terima kasih juga buat Elma Dayana yang selalu mendukung, mendoakan dan selalu memberi motivasi dalam pengerjaan skripsi ini
15. Semua responden dan pihak yang tidak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membatu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, karenanya kritik dan saran sangat diperlukan dari pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, Agustus 2018

Agung Nugraha

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penulisan 6
1.4 Kegunaan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 SAK Pemerintah 8
2.2 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 9
2.3 Pengertian Badan Layanan Umum 13
2.4 Akuntansi Rumah Sakit 15
2.5 Unsur Laporan Keuangan 17
2.6 PSAP Nomor 13 22
2.7 Tinjauan Empirik 26
BAB III METODE PENELITIAN 28
3.1 Rencana Penelitian 28
3.2 Kehadiran Peneliti 28
3.3 Lokasi Penelitian 29
3.4 Jenis dan Sumber Data 29
3.5 Pengumpulan Data 29
3.6 Teknik Analisis Data 30
3.7 Analisis Data 31
3.8 Tahapan Penelitian 34
BAB IV HASIL Dan PEMBAHASAN 35
4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit 35
4.2 Hasil Penelitian 38

BAB V KESIMPULAN Dan SARAN 51
5.1 Kesimpulan 51
5.2 Saran 51
DAFTAR PUSTAKA 52

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Perbandingan Neraca Menurut KMK Nomor 1981 Tahun 2010..... 27
2. Perbandingan Laporan Aktivitas Nomor 1981 Tahun 2010..... 27
3. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran PP Nomor 71 Tahun 2010..... 40
4. Laporan Realisasi Anggaran 42
5. Penyajian Laporan Neraca Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010. 43
6. Laporan Neraca 45
7. Penyajian Laporan Arus Kas Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010…… 47
8. Penyajian Laporan CALK Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 48

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual Berdasarkan SAP Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum

(Studi Kasus Pada RSUD Type B Kota Parepare)

Agung Nugraha

Siprianus Palete

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dalam penyajian laporan keuangan RSUD Type B Kota Parepare Berstatus BLUD penuh dengan mengacu PP Nomor 71 Tahun 2010. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif dengan metode komperatif yaitu membandingkan penerapan atas penyajian laporan keuangan keuangan yang telah disusun RSUD Type Kota Parepare dengan laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Komponen laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian atas laporan keuangan RSUD Type B Parepare berstatus BLUD penuh secara garis besar telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan, namum belum menyajikan laporan arus kas berbasis standar akutansi pemerintah (SAP) yang disesuaikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk entitas pelaporan dalam keuangan untuk hal konsolidasi, juga sebagai pihak berkepentingan.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan

Analysis of Presentation of Accrual-Based Financial Statements Based on SAP at Public Service Agency Status Hospital.

(Case Study in Type B City Hospital of Parepare City)

Agung Nugraha

Siprianus Palete

Abstract

This study aims to determine the application in the presentation of financial statements Type B City Hospital Parepare BLUD full status with reference to PP No. 71 of 2010. Analysis of data is descriptive qualitative with comparative method that is comparing the application of the presentation of financial statements that have been prepared Type of City Hospital Parepare with financial statements based on Government Regulation No. 71 of 2010. The components of the financial statements consist of reports on budget realization, balance sheets, cash flows, and notes to financial statements. The results showed that the presentation of the financial statements of Type B Parepare General Hospital with full BLUD status in general had been in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 in presenting financial statements, but not yet presented cash flow reports based on government accounting standards (SAP) adjusted to PP No. 71 Year 2010 for reporting entities in finance for consolidation matters, as well as interested parties.

Keywords: Government Regulation Number 71 of 2010, Financial Statements.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang disebut *Good Govermance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut, setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Keuangan negara atau daerah menurut Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lalu hak dan kewajiban dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD.

Paradigma pengelolaan keuangan negara yang teratur dalam perundang-undangan dibidang keuangan negara yang meliputi Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas-transparansi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di indonesia.

Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mesyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Rumah sakit sebagai salah satu Badan Layanan Umum yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat indonesia. Namun, tidak sedikit keluhan masyarakat indonesia selama ini pada kualitas pelayanan rumah sakit yang masih dinilai rendah. Perkembangan pengelolaan rumah sakit saat ini, baik dari aspek manajemen maupun operasionalnya sangat terpengaruh oleh berbagai tuntutan dari lingkungan sekitar yaitu bahwa rumah sakit dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang sangat bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien yang berobat atau memeriksa.

Tuntutan lain dari rumah sakit adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan adalah masalah kompleks karena di pengaruhi oleh beberapa pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis dan sumber daya manusia (SDM) yang d punyai dan yang terpenting adalah perkembangan teknologi yang berkembang dari rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit yang terdapat di tingkat kota dan beberapa tingkat daerah tidak terlepas dari pengaruh tuntutan tersebut. Secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang

menggolongkan masyarakat kelas menengah ke bawah atau bisa dikatakan tidak terlalu kaya,sedangkan untuk rumah sakit swasta menyediakan layanan jasa yang menggolongkan masyarakat menengah ke atas atau bisa dikatakan yang mampu.

Biaya kesehatan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dan pihak rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah-masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Pemerintah disini memiliki peranan yang sangat terpenting. Ditinjau dari *mechanic view* pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari *organic view* pemerintah berfungsi sebagai *public service agency* dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator sangat erat sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayanan masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat ditransformasikan menjadi unit yang otonom.

Transformasi fungsi kegiatan sebagai unit yang otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan, antara lain: kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, pengolahan data, administrasi kendaraan, pengelolaan dana bergulir, pembinaan olahraga, pemeliharaan jalan, pemungatan pajak dan retribusi, pembinaan calon tenaga kerja, pertamanan dan kebersihan. Sementara itu kegiatan yang tidak bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom antara lain: kegiatan legislasi, pengaturan (regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, penganggaran, peradilan, penindakan, dan pertanggungjawaban.

Ditetapkannya PP Nomor 71 tahun 2010 maka penerapan sistema akuntansi pemerintah telah mempunyai landasan hukum. Dalam hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat menerapkan SAP yang baru. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU Nomor 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. SAP tersebut disusun oleh komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK).

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan adalah salah satu hal yang menjadi konsentrasi pemerintah dalam upaya penerapan akuntanbilitas keuangan yang sehat. Adanya otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan secara transparansi dan tepat. Instansi pemerintah daerah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada perancanaan strategis yang telah ditetapkan tuntutan yang semakin besar terhadap akuntanbilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhu syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan peraturan itu adalah peraturan Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai acuan pemerintah pusat dan daerah melaksanakan tugasnya

RSUD Type B Kota Parepare merupakan rumah sakit berstatus BLUD penuh setelah ditetapkan pada tahun 2010, maka laporan keuangan yang tersaji oleh rumah sakit mengikuti BLU penuh yang dimana di dalamnya diatur dengan Peraturan Pemenrintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pedoman akuntansi dalam penyajian dan penerapan laporan keuangan keuangan bagian BLU penuh. Laporan keuangan RSUD Type B Parepare secara organisasi belum diaudit oleh pihak auditor independen tetapi untuk hal konsilidasi dan pelaporan di Pemerintah Daerah Parepare telah di lakukan audit oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit badan layanan umum adalah Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan pemerintahan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan pemerintahan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya menyusun dan menyajikanlaporan keuangan yang berstandar akuntasi pemerintahmaka penulis tertarik mengambil judul: **"Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual Berdasarkan SAP pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi kasus pada RSUD TYPE B Kota Parepare)".**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas permasalah pokok yang bisa diambil dari peneliti dapat rumuskan ialah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan RSUD TYPE B Kota Parepare sudah mengacu pada ketentuan SAP?
2. Apakah telah sesuai ketentuan mengenai badan layanan umum?

1.3Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan pada RSUD TYPE B Parepare berdasarkan SAP.

1.4Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini,diharapkan dapat menambah wawasan bagaimanakah standar akuntansi pemerintah dan penyajiannya dalam laporan keuangan RSUD serta dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya mengenai standar akuntansi pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktisi dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit

   Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak rumah sakit tentang hal-hal yang diperhatikan dalam penyajian menurut Peraturan Pemerintah.

2. Bagi Penulis

   Dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman dalam menjabarkan teori-teori yang telah diperoleh selama ini, khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang ada.

3. Bagi Pihak Lain

   Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan digunakan sebagai acuan penelitian lebih lanjut ataupun peneliti sejenis selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 SAK Pemerintah

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah membuat perubahan terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan aset,serta kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas,kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sampai basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP),dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (KKAP). SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan selengkapnya adalah peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,yang terdiri dari:

1. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
2. Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas menuju Akrual.

3. Lampiran III Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (KDP-LK) sama-sama menunjuk pada empat pihak, yaitu komite penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa (auditor) dan para pemainnya.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Standar ini diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) , yaitu instansi pemerintah pusat,instansi pemerintah daerah. Badan usaha milik negara (BUMN) sebagai investasi pemerintah menggunakan PSAK 45, sedangkan untuk pelaporan dan lain yang mengikuti PSAK atau SAK ETAP. Laporan keuangan menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan operasional
6. Laporan perubahan entitas
7. Catatan atas laporan keuangan

2.2 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

a. Penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya
b. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar
c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar akuntansi pemerintahan

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.

2.2.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karateristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
    a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
    b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah

c. Adanya pengaruh proses politik
d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah

2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
   a. Anggran sebagai pernyataan kebijakan publik,target fiskal dan sebagai alas pengendalian
   b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapat; dan
   c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

Dalam bentuk negara kesatuan republik indonesia yang berasa demokrasi kekuasanaa ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif,legislatif dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

Sebagaimana belaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan,pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan aprosisasi tersebut. Pihak eksekutif bertanggungjawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepadapihak legislatif rakyat.

2.2.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan,yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas.
b. Asumsi kesinambungan entitas.
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measure-ment).*

Asumsi kemandirian entitas,baik entitas pelaporan maupun akuntansi berarti bahwa setiap organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit instansi pemerintah dalam laporan pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya indikasi ini adalah adanya kewenangaan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang tejadi akibat keputusan entitas serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

2.3 Pengertian Badan Layanan Umum

Sesuai dengan pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara disebutkan: “Badan layanan umum adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas”

Secara spesifik karateristik organisasi yang merupakan Badan Layanan Umum,yaitu:

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara.
2. Menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak mengutamakan pencarian laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efesiensi dan produktivitas ala korporasi.
5. Rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLU bukan subjek pajak.

Sehubungan dengan karateristik yang spesifik tersebut BLU dihadapkan pada peraturan yang spesifik pula,berbeda dengan organisasi yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD),perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut :

1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelanggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan
3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh menteri keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan
4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
6. Rencana kerja dan anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah
8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan
9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi badan layanan umum yang melayani umum masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara profesional,efektif dan efesien oleh pengelolala unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

Karateristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

2.4 Akuntansi Rumah Sakit

Rumah sakit dapat diklasifikasikan sebagai usaha yang dimiliki investor entitas nirlaba yang menutupi biayanya dengan menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya atau entitas pemerintahan. Rumah sakit sektor swasta menggunakan pedoman akuntansi dan peraturan FASB,rumah sakit sektor publik (pemerintahan) menggunakan pedoman akuntansi GASB. Rumah sakit yang dimiliki oleh investor ini mencari sumber keuangan tambahan melalui penjualan saham dan penerbitan utang dalam jumlah besar rumah sakit mencari laba menyediakan jenis laporan keuangan yang sama dengan entitas komersial. Rumah sakit nirlaba menyajikan hasil keuangannya menggunakan laporan keuangan format khusus yang diharuskan FASB. Rumah sakit nirlaba sering kali berafiliasi dengan universitas kelompok keagamaan atau asosiasi masyarakat sipil. Rumah sakit pemerintah menggunakan akuntansi dan peraturan GASB dan dianggap entitas bertujuan khusus yang melakukan aktivitas usaha tertentu.

Rumah sakit pemerintah kemuadian dimasukkan dalam laporan keuangan unit pemerintah dari pemerintah secara keseluruhan.

Meskipun tidak wajib untuk melakukannya banyak rumah sakit telah menggunakan struktur akuntansi dana untuk keperluan akuntansi. Secara umum,aktivitas operasi dilaksanakan dalam dana umum,dan sejumlah dana yang dibatasi digunakan untuk mencatat aktiva-aktiva yang penggunaannya dibatasi oleh pihak donor. Pembahasan tentang pelaporan akuntansi dan keuangan untuk rumah berikut ini mengasumsikan bahwa aktiva yang tidak dibatasi dicatat dalam dana umum dan satu atau lebih dana terpisah digunakan untuk mencatat aktiva yang dibatasi sementara waktu dan secara permanen.

Seluruh transaksi yang mencakup penggunaan aktiva yang tidak dibatasi tersebut dicatat dalam dana umum. Dengan demikian, dana umum merupakan dan operasi utama rumah sakit. Aktiva yang dibatasi hingga suatu periode penggunaan atau yang harus digunakan untuk tujuan tertentu dicatat dalam dana yang dibatasi hingga pembatasan tersebut berakhir. Pada waktu pembatasan tersebut telah berakhir,aktiva direklasifikasikan dari dana yang dibatasi kedalam dana umum (yang tidak dibatasi), segala beban yang terjadi untuk memenuhi ketentuan pembatasan dilaporkan sebagai beban dalam dana umum. Akun dana yang dibatasi mencatat aktiva yang diterima dari pihak donor atau pihak ketiga lainnya yang telah menetapkan pembahasan tertentu atas penggunaannya. Dana yang dibatasi sering disebut juga sebagai dana “yang ditahan” karena aktiva yang dibatasi harus ditahan dan sumber daya yang dapat digunakan harus dialihkan pada dana umum untuk dimanfaatkan.

Dana umum, akun dana (*general fund*) untuk sumber daya yang diterima dan digunakan untuk misi layanan kesehatan rumah sakit yang utama. Dasar akuntansi adalah metode akrual untuk mengukur sepenuhnya seluruh beban untuk menyediakan layanan selama periode berjalan. Dewan pelaksana dapat

menetapkan sumber daya yang ditentukan dewan dalam danan umum. Sebagai contoh,dewan dapat menentukan sumber daya untuk perluasan rumah sakit,pelunasan utang atau untuk keperluan lain. Apabila dana yang ditentukan dengan cara ini dianggap sebagai bagian dari dana yang tidak dibatasi, maka penentuan ini memberikan informasi mengenai maksud penggunaan sumber daya tersebut.

Dana yang dibatasi donor, seluruh akun dana yang dibatasi mencatat sumber daya yang penggunaannya dibatasi oleh pihak donor. Untuk keperluan pelaporan keuangan,perlu dilakukan perbedaan antara dana yang dibatasi sementara waktu dan secara permanen. Dana yang dibatasi sementara waktu yang utama adalah dana yang bertujuan khusus ,dana yang dibatasi waktu serta dana penggantian dan pengembangan fasilitas. Dana yang dibatasi secara permanen merupakan aktiva yang di pertahankan secara terus menerus dan secara umum dimasukkan sebagai dana abadi. Rumah sakit juga dapat membatasi dana pinjaman dan dana anuitas serta pendapatan seumur hidup. Namun demikian, hanya sedikit rumah sakit yang menggunakan dana ini

2.5 Unsur Laporan Keuangan

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporann. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/ bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran bendara umum negara/ bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
f. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yag dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.5.1 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

2.5.2 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atas penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2.5.3 Kewajiban

Karateristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

2.5.4 Ekuitas dana

Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek
2. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang
3. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2.5.4 Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaraan, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang

dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefenisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah

2.5.5 Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapain target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijkan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan

5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.5.6 Laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan di maksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi dan surplus atau defisit. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah laporan perubahan ekuitas yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimkasud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk memperkerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Secara umum, standar akuntansi badan layanan umum mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP ini. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak pisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.

BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Pendananaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD.
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk.
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya

dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan.
f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga.
g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan membawahinya.
h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
i. Laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

Pernyataan standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan BLU disajikan paling kurang sekali dalam setahun. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLU bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan yang tepat waktu.

Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran BLU paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapan LRA
b. Belanja
c. Surplus/defisit LRA
d. Penerimaan Pembiayaan
e. Pengeluaran Pembiayaan
f. Pembiayaan Neto
g. Sisa/lebih kurang pembiayaan anggaran

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Kas dan setara kas
b. Investasi jangka pendek
c. Piutang dari kegiatan BLU
d. Persediaan
e. Investasi jangka panjang
f. Aset tetap
g. Aset lainnya
h. Kewajiban jangka pendek
i. Kewajiban jangka panjang; dan
j. Ekuitas

Laporan arus kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD.

b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat

c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan.

d. Pendapatan hasil kerja sama

e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

f. Pendapatan BLU lainnya.

Arus kas keluar untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

a. Pembayaran pegawai.

b. Pembayaran barang.

c. Pembayaran bunga; dan

d. Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa.

2.7 Tinjauan Empirik

Tabel 1

Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	M.N. Afif, M. Yusuf (2017)	Analisis Laporan Keuangan Rumah Sakit Berdasarkan KMK Nomor 1981 Tahun 2010 Pada RSUD Cimacan	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan RSUD Cimacan berstatus BLUD penuh sudah sesuai dengan KMK Nomor 1981 Tahun 2010 sebagai pedoman BLU-RS, tetapi belum secara penuh dalam laporan keuangan yang disajikan sebagai BLUD dikarenakan RSUD Cimacan hanya menyajikan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional , perubahan ekuitas dan CALK, namun belum

			menyajikan Laporan Arus Kas yang disajikan sesuai berbasis SAP.
2	Riani Isye Kawenas, Lintje Kalangi, Linda Lambey	Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kendala yang ditemui dalam penerapan PSAP Nomor 13 yaitu belum adanya regulasi yang lebih jelas mengatur tentang alur pengakuan pendapatan netto lebih khusus bagi KSO yang melibatkan pihak ketiga yaitu BPJS-Kesehatan. Kendala tidak tersedianya petunjuk teknis ini menyebabkan penerapan PSAP Nomor 13 tidak bisa dilaksanakan secara penuh.
3	Nirwati Husain, Grace B Nangoi, Hendrik Manosso	Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Tani dan Nelayan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa RSTN Kabupaten Boalemo dalam menerapkan Penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada 2 standar yakni berdasarkan SAK dan SAP di dukung oleh Peraturan, Kebijakan, Program, Prosedur, dan Tata kelola yang baik. Serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan SAK dan SAP.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rencana Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini rancangn penelitian yang akan digunakan adalah bersifat studi kasus. Dengan metode ini diperoleh fakta-fakta mengenai mengenai kebijakan perlakuan standar akuntansi pemerintah dengan cara mengamati dan menganalisa suatu masalah objek penelitian yang terjadi pada tempat penelitian terhadap kesesuaian yang ada kemungkinan menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang berbentuk deskriptif,yaitu penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu tempat penelitian dengan pendekatan kualitatif agar penulis dapat memberikan gambar mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap akuntasi pemerintah yang dimiliki rumah sakit dan penyajiannya. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkannya.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan dan mendengar secara cermat mungkin. Peneliti melakukan penelitian dengan cara mewawancarai seorang Direktur Keuangan dan ada beberapa staff Rumah Sakit Type B Parepare dan mengambil laporan keuangan rumah sakit.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan di RSUD TYPE B kota Pare-pare,kecamatan bacukiki, kota Pare-pare. Penelitian ini dilakukan dari pertengah bulan mei hingga bulan juni 2018.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

   Berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai struktur organisasi,aktivitas operasional yang terjadi dan gambaran umum organisasi.

2. Data sekunder

   Berupa data internal yang diperoleh objek yang diteliti yaitu berupa laporan keuangan RSUD TYPE B Kota Parepare tahun 2014 dan laporan evaluasi kinerja RSUD TYPE B Kota Parepare 2014.

3.5 Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi lapangan

   Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian yaitu pada RSUD TYPE B Parepare.

2. Studi kepustakaan

   Maksud dari studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data teoritis yang menjadi landasan teori untuk melaksanakan penelitian ini dengan cara mempelajari berbagai buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan

penyusunan penelitian ini serta menganalis data yang di peroleh dari RSUD TYPE B Parepare.

3. Wawancara

   Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui dokumentasi. Peneliti mewawancarai Direktur Keuangan dan beberapa staff keuangan yang mengatahui informasi keuangan Rumah Sakit Type B kota Parepare.

3.6 Teknik analisis data

Menurut miles dan hubermen dalam sugiyono (2012) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Melalui proses analisis yang merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dalam proyek penelitian dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan studi kepustakaan dengan cara mengorgasasi data ke dalam kategori yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan dengan 3 tahap yaitu, data reaksi,penyajian data,verifikasi.

1. Reduksi data

   Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang direduksi dari laporan keuangan RSUD TYPE B Parepare akan dibandingkan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu : Laporan realisasi anggaran,Neraca,Laporan Arus Kas,Laporan Operasional,Laporan Perubahan Ekuitas,Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Penyajian data

   Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun,sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data laporan keuangan Rumah Sakit TYPE B Parepare,yaitu: Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Penarikan kesimpulan

   Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang didapat digunakan untuk mengambil tindakan.

3.7 Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam analisis deskriptif menurut Wirartha (2005:154) deskriptif adalah penelitian penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Pengujian ini tidak menguji hipotesis melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara dokumentasi dengan menginterprestasikan dan cara reduksi data mana yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting dan tidak mengacu pada

kontribusi dat tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian agar dapat dipahami dengan mudah.

a. Laporan realisasi anggran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria laporan realisasi anggaran. Adapun kriteria dari Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.
2. Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
3. Menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
4. Menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
5. Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter.

b. Neraca

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria Neraca. Adapun kriteria dari Neraca adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
2. Mengungkapka setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan.

3. Menyajikan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan.
4. Mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria Laporan Arus Kas. Adapun kriteria dari Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan.
3. Arus kas diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria Catatan atas laporan Keuangan. Adapun kriteria dari catatan atas laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro pencapaian target undang-undanf APBN/Perda APBD.
2. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis.
3. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

3.8 Tahapan Penelitian

Tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami bagian-bagian struktur organisasi yang sesuai dengan penelitian di RSUD TYPE B Parepare.
2. Memahami rangkaian kegiatan yang dilakukan di bidang keuangan Rumah sakit.
3. Mengumpukan data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian.
4. Menarik suatu kesimpulan serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Rumah Sakit

Pada tahun 1924 didirikan Rumah Sakit Umum di Kota Parepare yang saat itu masih terletak di jalan Ganggawa. Ada 2 orang Dokter Berkebangsaan Asing yang betugas saat itu yaitu Dr. Debats dari belanda dan Dr. Maani dari Pakistan. Pada tahun 1987 Rumah Sakit Umum berpindah lokasi dari Jalan Ganggawa ke Jalan Nurussamawati Nomor 09 dan juga berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, yang diambil nama dari Pahlawan dari Kota Parepare. Dibangun dengan bantuan dari Bank Dunia. Pada tahun 1988, Rumah Sakit Tipe kelas C yang secara teknis administrasi maupun secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Walikota Parepare melalui Sekertaris Daerah Kota Parepare, serta merupakan Rumah Sakit rujukan dari beberapa Kabupaten/Kota sekitarnya, utamanya dari Kabupaten/Kota di bagian Utara Provinsi di Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2009, dalam perkembangan lebih lanjut RSUD Andi Makassau Parepare sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada tanggal 7 Mei 2009, RSUD Andi Makassau Kota Parepare dinaikkan statusnya menjadi Rumah Sakit Type B Non Pendidikan berdasarkan Keputuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 343/Menkes/SK/V/2009.

Kedudukan RSUD Andi Makassau Kota Parepare yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh Direktur yang berada dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Layanan Umum Daerah RSUD Andi Makassau Parepare adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Adapun fungsi dari RSUD Andi Makassau Parepare yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pedidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan;
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

4.2 Visi, Misi, dan Motto

Adapun Visi, Misi dan Motto dari Rumah Sakit Type B Parepare disebutkan sebagai berikut:

4.2.1 VISI

Menjadi pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang unggul dan berstandar Internasional.

4.2.2 MISI

1. Memberikan pelayanan yang bermutu dan berorientasi kepada pelanggan
2. Meningkatkan daya saing Rumah Sakit melalui pelayanan unggul
3. Menyelenggarakan pelayanan, pelatihan dan penelitian kesehatan
4. Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang profesional dan transparan

4.2.3 MOTTO

Keselamatan pasien yang paling utama (*The Main Pantient Safety).*

Dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B Parepare memiliki kegiatan yang mendukung yaitu sumber dana sarana dan prasana. Sarana, prasarana dan kegiatan RSUD Andi Makassau meliputi alat-alat kesehatan dan kegiatan penunjang pelayanan pada tahun 2017 diperoleh dari berbagai sumber dana yaitu DAU, DAK, dan PAD.

Adapun yang meliputi Sumber Dana Alokasi Umum (DAU):

Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1. Pengadaan obat rumah sakit
2. Pencegahan dan pengobatan HIV-AIDS
3. Penambahan daya
4. Pelayanan kesehatan pasien Non BPJS
5. Pembangunan gedung rawat jalan
6. Pengadaan mebeleur rumah sakit
7. Pembangunan gedung VIP
8. Pembangunan ruang terbuka hijau
9. Pembangunan ruang tunggu pasien

10. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung RS
11. Pengadaan Alat Kesehatan
12. Pengadaan halaman parkir

Adapun juga Sumber Dana Alokasi Khusus rumah sakit,sebagi berikut:

Program : Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.

Kegiatan :

1. Pembangunan gedung kesehatan
2. Pengadaaan alat kesehatan dan kedokteran
3. Pembangunan gedung rawat jalan
4. Pengadaan ambulans dan peralatan rumah sakit

Terakhir adalah Sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rumah Sakit Type B Kota Parepare, yaitu sebagai berikut:

Program : Kegiatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kegiatan :

1. Pelayanan BLUD : Obat-obatan dan alat kedokteran.
2. Pendukung pelayanan BLUD : sarana dan prasarana rumah sakit.

4.3 Hasil Penelitian

Catatan Atas Laporan Keuangan RSUD Type B Parepare tahun 2014 menerangkan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan dan praktik-praktik yang dipilih pemda sebagai pedoman dalam menyusun, menerapkan, dan menyajikan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan dalam meningkat keterbandingan terhadap anggaran, baik antar periode maupun antar entitas. Penyusunan, penyajian, dan penerapan laporan keuangan tahun 2014 mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 (Pergantian dari PP No. 24 Tahun 2005) dan SAK ETAP untuk kepentingan Pihak lainnya.

Perbandingan atau metode komparatif yang dilakukan untuk mengetahui apakah sudah sesuai laporan keuangan RSUD berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) penuh dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya akan disajikan tabel perbandingan sesuai dengan data yang di peroleh dari Rumah Sakit serta hasil wawancara dengan bagian keuangan RSUD Type B Parepare dapat dilihat pada tabel yang disajikan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 3 : Penyajian laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010

No	Penyajian Laporan Keuangan Menurut PP No 71 tahun 2010	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : pendapatan, belanja, surplus/defisit.	✓	
2	Menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan	✓	
3	Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter	✓	

Sumber: Data hasil olahan, 2018

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan tentang penyajian laporan realisasi anggaran laporan keuangan 2014 yang disusun oleh RSUD Type B Parepare sesuai aturan standar dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dimana di dalam Laporan

Realisasi Anggaran dia menjelaskan sekurang-kurangnya dari unsur pendapatan yang dimana pihak Rumah Sakit menjelaskan pendapatan diposisi pertama/awal. Dimana pihak Rumah Sakit juga menjelaskan belanja dan surplus atau defisit di laporan kedua dan ketiga di dalam dalam laporan keuangan yang termasuk dari Laporan Realisasi Anggaran.

Pihak Rumah Sakit juga menjelaskan/menggambarkan perbandingan setiap anggaran yang dikeluarkan rumah sakit dengan realisasi satu periode pelaporan dengan melihat peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010,dalam menjelaskan setiap anggaran tersebut pihak rumah sakit lihat peraturan tersebut.Dalam penyajian laporan keuangan RSUD Type B parepare, manajer keuangan rumah sakit menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran yang dilakukan dari pihak rumah sakit tersebut.

Jadi pihak Rumah Sakit menyajikan anggaran pendapatan, belanja dan surplus/defisit yang dimana anggaran tersebut pada Tahun 2014, yang dimana dalam pendapatan tersebut ada beberapa pendapatan didalamnya yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan BLUD, Pendapatan BLUD. Anggaran belanja juga terbagi didalamnya ada beberapa yaitu: belanja daerah, belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Dimana didalam anggaran tersebut pihak rumah sakit mempunyai target yang sudah dia butuhkan dan juga pihak rumah sakit akan menyajikan pendapatan, belanja, dan surplus/defisit yang terealisasi atau yang didapat dari target rumah sakit tersebut.

4.3.1 Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit

Tabel 4 : Penyajian laporan realisasi anggaran

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
Pendapatan Daerah	Rp 48.296.136.841	Rp 67.821.148.929	Rp 19.525.012.088	140,03 %
Pendapatan Asli daerah	Rp 48.296.136.841	Rp 67.821.148.929	Rp 19.525.012.088	140,03 %
Pendapatan BLUD	Rp 48.296.136.841	Rp 67.821.148.929	Rp 19.525.012.088	140,03 %
Pendapatan BlUD	Rp 37.500.000.000	Rp 40.018.024.550	Rp (2.518.024.550)	106,71 %
Jumlah	**Rp 48.296.136.841**	**Rp 67.821.148.929**	**Rp 19.525.012.088**	**140,43** %
Belanja Daerah	Rp 96.285.014.341	Rp 98.216.728.561	Rp (1.931.714.220)	102,01 %
Belanja Operasi	Rp 87.464.751.341	Rp 89.625.760.879	Rp (2.161.009.538)	102,47 %
Belanja Pegawai	Rp 20.594.510.500	Rp 20.451.481.379	Rp 143.029.121	99,31
Belanja Barang dan Jasa	Rp 66.870.240.841	Rp 69.174.279.500	Rp (2.304.038.659)	103,45
Belanja Modal	Rp 8.820.263.000	Rp 8.590.967.682	Rp 229.295.318	97,4
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp 832.000.000	Rp 905.616.740	Rp (73.616.740)	108,85
Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp 365.500.000	Rp 372.263.000	Rp (6.763.000)	101,85
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	Rp 208.171.000	Rp 232.503.000	Rp (24.332.000)	111,69
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	Rp 7.014.592.000	Rp 6.900.686.842	Rp 113.905.158	98,38
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Rp 400.000.000	Rp 179.898.100	Rp 220.101.900	44,97
Jumlah	**Rp 96.285.014.341**	**Rp 98.216.728.561**	**Rp (1.931.714.220)**	**102,01**
Surplus/(Defesit)	**Rp (47.988.877.500)**	**Rp (30.395.579.631)**	**Rp 21.456.726.308**	***63,34***

4.3.2 Perbandingan Realisasi dan Anggaran dalam 1 periode pelaporan

Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Type B Parepare menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode Pelaporan keuangan rumah sakit yang dimana dalam pelaporan tersebut perhitungannya pada 31 Januari 2015. Untuk membandingkan Realisasi dan Anggaran sebagai berikut, Jumlah Anggaran dan Realisasi pada Tahun 2014,dimana jumlah

anggaran atau target utamanya yaitu sebesar Rp 96.285.014.341,00, dan ketika terealisasi jumlahnya sebesar Rp 98.216.728.561,00 jauh dari perkiraan jumlah anggaran yang ditargetkan pada tahun tersebut.

2. Neraca

Tabel 5: Penyajian Laporan Keuangan Menurut PP No. 71 Tahun 2010

No	Penyajian Laporan Keuangan Menurut PP No 71 Tahun 2010	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu	✓	
2	Mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan	✓	
3	Menyajikan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan.	✓	
4	Mencantumkan sekurang-kurangnya pos seperti kas dan setara kas, investasi jangka pendek, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, ekuitas dana	✓	

Sumber: Data Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan hasil tabel 2 diatas menjelaskan tentang penyajian neraca laporan keuangan tahun 2014 yang disusun oleh RSUD Type B Parepare sesuai aturan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana pihak rumah sakit menjelaskan atau menggambarkan suatu posisi entitas pelaporan keuangan rumah sakit yang dimana didalam pelaporan tersebut pihak rumah sakit

menggambarkan atau menjelaskan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu yang terdapat didalam laporan keuangan rumah sakit.

Pihak rumah sakit juga mengungkapkan setiap pos-pos aset dan kewajiban yang dijelaskan oleh rumah sakit yang dimana didalam pengungkapan jumlah yang di diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan oleh pihak rumah sakit juga harus berpatokan pada peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan terkaitnya APBD tersebut.

Dalam menyajikan infomasi keuangan rumah sakit tentang tanggal penyelesai aset nonkeuangan dan kewajiban pihak rumah sakit harus menyajikan informasi tersebut dengan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana rumah sakit juga menyajiakan informasi tersebut yang dimana didalamnya tersebut menjelaskan persediaan dan cadangan dari penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban. Didalam mencatumkan pihak rumah sakit juga menjelaskan sekurang-kurangnya pos-pos yang termasuk dalam necara yaitu sebagai berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, dan ekuitas dana.

Jadi pihak Rumah Sakit menyajikan, menggambarkan, dan mencatumkan beberapa anggaran Neraca yang dimana anggaran tersebut pada Tahun 2014, yang didalam neraca tersebut ada beberapa didalamnya yaitu: Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana.

4.3.2 Posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu

Tabel 6 : Penyajian laporan neraca

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN	
	2014	2013	JUMLAH	%
ASET				
ASET LANCAR				
KAS	Rp 16.274.410.071	Rp 338.730.203	Rp 15.935.679.868	4.705
KAS DI BANK (REK. BLUD)	Rp 16.259.130.837	Rp 337.862.374	Rp 15.921.268.463	4.712
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 15.279.234	Rp -	Rp 15.279.234	0
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	Rp -	Rp 867.829	Rp (867.829)	-100
PIUTANG	Rp 8.425.796.398	Rp 17.919.431.723	Rp (9.493.635.325)	
PIUTANG RETRIBUSI	Rp 8.425.796.398	Rp 17.919.431.723	Rp (9.493.635.325)	
PIUTANG LAIN-LAIN	Rp -	Rp -	Rp -	
PERSEDIAAN	Rp 2.260.918.072	Rp 3.139.774.683	Rp (878.856.611)	-27,99
JUMLAH	**Rp 26.961.124.541**	**Rp 21.397.936.609**	**Rp 5.563.187.932**	**26**
ASET TETAP				
TANAH	Rp 10.080.000.000	Rp 10.080.000.000	Rp -	0
TANAH	Rp 10.080.000.000	Rp 10.080.000.000	Rp -	0
PERALATAN DAN MESIN	Rp 22.541.546.607	Rp 14.462.668.717	Rp 8.078.877.890	55,86
ALAT-ALAT BERAT	Rp 1.403.945.060	Rp 692.545.900	Rp 711.399.160	102,72
ALAT-ALAT ANGKUTAN	Rp 1.041.000.000	Rp 1.041.000.000	Rp -	0
ALAT BENGKEL	Rp 2.160.000	Rp 2.160.000	Rp -	0
ALAT PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Rp -	Rp -	Rp -	0
ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Rp 4.448.057.896	Rp 3.108.987.171	Rp 1.339.070.725	43,07
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	Rp -	Rp -	Rp -	0
ALAT UKUR	Rp -	Rp -	Rp -	0
ALAT-ALAT KEDOKTERAN	Rp 15.638.903.651	Rp 9.610.495.646	Rp 6.028.408.005	0,00
ALAT LABOTARIUM	Rp 7.480.000	Rp 7.480.000	Rp -	0
ALAT KEAMANAN	Rp -	Rp -	Rp -	0
GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 33.433.898.200	Rp 33.433.898.200	Rp -	0
BANGUNAN GEDUNG	Rp 33.433.898.200	Rp 33.433.898.200	Rp -	0
BANGUNAN MONUMEN	Rp -	Rp -	Rp -	0
JALAN,IRIGASI,DAN JARINGAN	Rp 462.330.000	Rp 462.330.000	Rp -	0
JALAN DAN JEMBATAN	Rp 273.910.000	Rp 273.910.000	Rp -	0

BANGUNAN AIR	Rp 188.420.000	Rp 188.420.000	Rp -	0
INSTALANSI	Rp -	Rp -	Rp -	0
JARINGAN	Rp -	Rp -	Rp -	0
ASET TETAP LAINNYA	Rp -	Rp -	Rp -	0
BUKU DAN PERPUSTAKAAN	Rp -	Rp -	Rp -	0
BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	Rp -	Rp -	Rp -	0
HEWAN/TERNAK DAN TUMBUHAN	Rp -	Rp -	Rp -	0
KONSTUKSI DALAM PENGERJAAN	Rp -	Rp -	Rp -	0
KONSTUKSI DALAM PENGERJAAN	Rp -	Rp -	Rp -	0
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	Rp (16.738.691.407)	Rp (12.147.349.173)	Rp (4.591.342.234)	37,80
NILAI BUKU	Rp 49.779.083.400	Rp 46.291.547.744	Rp 3.487.535.656	0,00
JUMLAH	**Rp 66.517.774.807**	**Rp 55.438.896.917**	**Rp 8.078.877.890**	**0**
ASET LAINNYA				
TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	Rp -	Rp -	Rp -	0
TAGIHAN TUTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	Rp -	Rp -	Rp -	0
KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	Rp -	Rp -	Rp -	0
ASET TAK BERWUJUD	Rp -	Rp -	Rp -	0
ASET LAIN-LAIN	Rp 698.560.000	Rp 698.560.000	Rp -	
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	Rp (284.507.999)	Rp (252.895.999)	Rp (31.612.000)	
NILAI BUKU	Rp 414.052.001	Rp 445.664.001	Rp 3.487.535.656	
JUMLAH	**Rp 698.560.000**	**Rp 698.560.000**	**Rp 3.519.147.656**	**503,77**
JUMLAH ASET	**Rp 77.154.259.942**	**Rp 68.135.148.354**	**Rp 12.538.259.244**	**18,40**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	Rp 39.952.000	Rp 4.636.327.046	Rp (4.596.375.046)	0
UANG MUKA DARI KAS DAERAH	Rp -	Rp -	Rp -	0
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	Rp -	Rp -	Rp -	0
UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	Rp 9.331.107.216	Rp 7.610.979.425	Rp 1.720.127.791	0
JUMLAH	**Rp 9.371.059.216**	**Rp 12.247.306..471**	**Rp (2.876.247.255)**	**0**

EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp 16.274.410.070	Rp 338.730.203	Rp 15.935.679.868	4.704,53
CADANGAN PIUTANG	Rp 8.425.796.398	Rp 17.919.431.723	Rp (9.493.635.325)	0
CADANGAN PERSEDIAAN	Rp 2.260.918.072	Rp 3.139.774.683	Rp (878.856.611)	0
BIAYA YANG HARUS DIBAYAR UNTUK UTANG	Rp (9.371.059.216)	Rp (12.247.306.471)	Rp 2.876.247.255	0
JUMLAH	Rp 17.590.065.325	Rp 9.150.630.138	Rp 8.439.435.187	4.704,53
EKUITAS DANA INVESTASI				
DIINVESTASIKAN DALAM ASET TETAP	Rp 49.779.083.400	Rp 46.291.547.744	Rp 3.487.535.656	7,53
DIINVESTASIKAN DALAM ASET LAINNYA	Rp 414.052.001	Rp 445.664.001	Rp (31.612.000)	-7,09
JUMLAH	Rp 50.193.135.401	Rp 46.737.211.745	Rp 3.455.923.656	7,39
EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN				
RK. PPKD				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**Rp 77.154.259.942**	**Rp 68.135.148.354**	**Rp 9.019.111.588**	**4.711,93**

3. Laporan Arus Kas

Tabel 7: Penyajian Laporan Keuangan Menurut PP No. 71 Tahun 2010

No	Penyajian Laporan Keuangan Menurut PP No 71 Tahun 2010	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi		✓
2	Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan		✓
3	Arus kas diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan		✓

Sumber: Data Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan hasil tabel 3 diatas menjelaskan tentang penyajian Laporan Arus Kas keuangan tahun 2014 yang disusun oleh RSUD Type B Parepare tidak sesuai aturan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana dalam peyajian laporan keuangan arus kas rumah sakit pihak dari rumah sakit tidak menyajikan berbagai informasi yang dimana didalam

tersebut mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas yang selama satu periode pelaporan akuntansi dengan melihat penyajian laporan keuangan yang diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Pihak rumah sakit yang terdapat diparepare yang dimana sebagai tempat penelitian peneliti juga tidak menjelaskan arus kas masuk dan keluarnya kas yang dimana didalam terjadinya klasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi yang dilakukan rumah sakit dan investasi aset nonkeuangan. Didalam terjadinya arus kas yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang dimana mengatur tentang arus kas masuk dan arus keluar juga tidak mengikuti berbagai peraturan pemerintah yang diatur didalam Standar Akuntansi Pemerintah.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 8: Penyajian Laporan Keuangan Menurut PP No. 71 Tahun 2010

No	Penyajian Laporan Keuangan menurut SAP	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD	✓	
2	Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis	✓	
3	Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran	✓	

Sumber: Data Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan hasil tabel 4 diatas menjelaskan tentang penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2014 yang disusun oleh RSUD Type B Parepare sesuai aturan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),dimana didalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan pihak menyajikan berbagai informasi yang dimana menyajikan tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro dan dimana percapaian

dari data tersebut yang harus melakukan pecapaian target yang atur Undang-Undangg APBN/Perda APBD. Dimana didalam Catatan Atas Laporan Keuangan rumah sakit tersebut penyajiannya dilakukan secara sistematis oleh pihak rumah sakit yang mengikuti peraturan. Ketika penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) semua sudah meliputi penjelasa-penjelasan yang telah disajikan didalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pembangunan bidang ekonomi di kota parepare dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara proporsional sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, tahun 2012, pertumbuhan ekonomi kota parepare mencapai,8,82%, dari tahun sebelumnya yaitu 8,05% atau 0,77% hal ini terjadi karena struktur perekonomian Kota Parepare masih didominasi oleh sektor perdangan, hotel, dan restaurant, sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian parepare.

Gambaran kebijakan keuangan Badan Layanan Kesehatan Daerah Kota Parepare tercermin pada APBD yang dijelakan sebagaiman tersebut:

4.3.4 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Kesehatan Daerah Tahun Anggaran 2014 mengalami peningkatan yaitu tumbuh sebesar Rp 27.803.148.929,02 atau 69,47% dari tahun 2013, secara terperinci yaitu pada tahun 2014 PAD mencapai sebesar Rp 67.821.148.929,02 dimana melampaui target yang diman telah ditetapkan sebesar Rp 48.300.000.000.

Adapun gambaran mengenai kondisi umum anggaran belanja pada badan pelayan kesehatan daerah tahun anggaran 2014, diuraikan

menurut bagian, kelompok dan jenis belanja dengan komposisi sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Belanja tidak lansung	Rp 19.658.111.629	
Belanja pegawai		Rp 19.658.111.629
Belanja langsung	Rp 78.558.616.932	
Belanja pegawai		Rp 793.369.750
Belanja barang dan jasa	Rp 69.174.279.500	
Belanja modal		Rp 8.590.967.682

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa total anggaran belanja tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 98.216.729.561, dan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 sebesar Rp 71.181.998.259,- maka anggaran belanja mengalami peningkatan sebesar Rp 27.034.730.302 atau sebesar 72,47%.

Laporan perhitungan APBD, sering juga disebut laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisir pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasinya surplus atau menutup defisit. Laporan perhitungan APBD/realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagi berikut: pendapatan, belanja, transfer, surplus, penerimaan pembiayaaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan perhitungan APBD meyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode akuntansi berjalan serta dibandingkan dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan periode akuntansi sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penyajian laporan keuangan RSUD Type B Parepare berstatus BLUD penuh secara garis besar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tetapi RSUD Type B Parepare belum secara penuh dalam laporan keuangan yang disajikan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Dikarenakan RSUD Type B Parepare hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Kinerja Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Namun pihak rumah sakit belum menyajikan informasi arus kas yang disajikan basis SAP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 untuk entitas ke pemda sebagai entias pelaporan dalam hal konsolidasi
2. Pelaporan keuangan RSUD Type B Parepare berstatus Badan Layanan Umum Daerah penuh belum sesuai dengan laporan keuangan yang diatur SAP dikarenakan belum menyajikan informasi arus kas sebagai komponen pelengkap laporan keuangan, dan untuk sebagai kebutuhan untuk pihak yang berkepentingan

5.2 Saran

Sebaiknya pihak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type B Parepare seharusnya sudah menerapkan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan dalam penyajian pelaporan keuangan yang sudah diterapkan oleh rumah sakit yang sudah berstatus badan layanan umum. Supaya didalam penyajian laporan keuangannya lebih mudah diatur ketika sudah menerapkan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Baker, E.R., Lembke, C.V., dan King E.T., 2006. *Advanced Financial Accounting*. Jakarta : Salemba Empat

Dharmanegara, I.B.A., dan Ikhsan, I. 2014. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Rumah Sakit.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Floyd A. Beams. 2000. *Akuntansi Keuangan Lanjutan.* Jakarta : Salemba Empat

Hendrawan, Ronny. 2011. *Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum.* Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Herry. 2009. *Teori Akuntansi.* Jakarta : Kencana

http: iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2015. *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta.

Mamesah, Melisa. 2013. *Penerapan PSAK No.45 Pada GMIM Efrata Sentrum Sonder Kaitannya Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.* Skripsi. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta : Andi

M.N. Afif, M. Yusuf. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Rumah Sakit Berdasarkan KMK Nomor 1981 Tahun 2010 Pada RSUD Cimacan*. Skripsi. Bogor : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 Tentang *Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.*